

### Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM (Studi UMKM Di Kabupaten Blora)

Ahmad Sholikin<sup>1)</sup> & Ade Setiawan<sup>2)</sup>

IAIN Surakarta

#### ARTICLES INFORMATION

---



Journal of Islamic Finance  
and Accounting

Vol. 1 No. 2  
Juni-November 2018  
pp: 35-50

Department of Sharia  
Accounting, Faculty of  
Islamic Economics and  
Business, IAIN Surakarta

---

**Keywords:** *The  
Readiness, SAK  
EMKM, SMEs*

*JEL Classification: O10,  
O18, R12*

#### *Abstract*

---

*SMEs has an important role in economic development in Indonesia. In this development, SMEs has several obstacles. One of them is the preparation of financial statements that are not in accordance with accounting standards in Indonesia. SAK ETAP is a standard for SMEs in preparing financial statements. However, many studies have suggested that the majority of SMEs in Indonesia have not been able to implement SAK ETAP because the standard are too complex. Therefore DSAK LAI publishes new financial accounting standard for SMEs which is SAK EMKM effective on January 01, 2018. The new standard is intended to assist the needs in the preparation of financial statements. The result of this research shows the level the readiness of SMEs in implementing SAK EMKM. In conducting this research, the researcher used descriptive qualitative research. The researcher collects the data of this research from the interview and documentation. The analysis is done by data reduction, data presentation, and conclusion. The results of this research shows that two SMEs in Blora Regency are not ready in applying SAK EMKM. The absence of SMEs have not done the preparation of financial statements.*

#### PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar (*Undang-undang No. 20 Tahun 2008*). Dalam kondisi yang kompetitif ini, pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan salah satu alternatif bagi pelaku ekonomi (Cahyati, 2011).

---

Corresponding author:

<sup>1)</sup> [adesetia12@gmail.com](mailto:adesetia12@gmail.com)

Menurut Divianto dan Febrianty (2017) bahwa peran utama keberadaan dan pertumbuhan UMKM pada umumnya dimaksudkan untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pembagian pendapatan. Dimana dengan pengembangan usahanya tidak lagi mencari lowongan pekerjaan karena mempunyai sebuah ladang pekerjaan sendiri.

Menurut Divianto dan Febrianty (2017) Peran UMKM sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa UMKM sudah menolong perekonomian di Indonesia, ini ditandai dengan meningkatnya produk domestic bruto (PDB) dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir pada 2016. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama ([m.detik.com](http://m.detik.com)).

Pengembangan UMKM merupakan salah satu langkah baik untuk memerangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Namun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi kendala yang menjadi penghambat berkembangnya sebuah usaha, faktor yang menjadi kendala adalah permodalan dalam pengembangan usaha. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Sidik Motik yaitu Persoalan UMKM itu pertama akses lembaga keuangan, itu persoalan mendasar dari dulu di JS Luwansa Jakarta ([Liputan6.com](http://Liputan6.com)). Sama dengan apa yang dipaparkan oleh Divianto dan Febrianty (2017) mengatakan bahwa sebagai kelompok usaha kecil, UMKM selalu terjebak dalam problem keterbatasan modal.

Kendala berikutnya adalah UMKM belum melakukan pemisahan antara uang pribadi dengan uang usaha, dan minimnya sumber daya manusia yang memahami tentang standar akuntansi keuangan. Seperti yang dikatakan oleh pemilik kerajinan bubut kayu Margo Santoso pada 17 Januari 2018, bahwa dulu sempat melakukan pembukuan, tetapi berjalannya waktu karena rasa malas dan tidak ada SDM yang mengurus. Akhirnya sekarang tidak melakukan pembukuan. Karena tidak ada pemisahan antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi sehingga Margo Santoso dalam melihat keuntungan dari hasil penjualan hanya dengan cara perkiraan.

Hasil penelitian terdahulu juga menjelaskan bahwa kebanyakan UMKM belum siap untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Kendala utama dalam penerapan standar tersebut adalah pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM masih sangat minim terhadap standar akuntansi. Oleh karenanya banyak UMKM yang tidak paham bahkan tidak tahu tentang SAK ETAP.

Oleh karena itu pentingnya laporan keuangan yang harus dibuat oleh UMKM se-

bagai alat untuk mendapatkan akses modal yang lebih mudah dari pihak lembaga keuangan. Karena laporan keuanganlah yang akan dijadikan sebagai objek analisis pihak bank untuk mencairkan pembiayaan kepada calon nasabah. Dalam hal pembiayaan di Bank BRI, untuk pengajuan KUR juga mensyaratkan kepada calon nasabah untuk melampirkan sebuah laporan keuangan ([www.bankbri.info](http://www.bankbri.info)).

Rudiantoro dan Siregar (2012) juga menyebutkan bahwa salah satu teknik pemberian kredit yang paling banyak digunakan adalah *financial statement lending* yang mendasarkan pemberian kreditnya atas informasi keuangan dari debiturnya. Apabila dilihat dari sisi lain hal tersebut menjadi kendala tersendiri, sebab UMKM ternyata tidak mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh bank tersebut. Padahal tidak semua pelaku UMKM paham terkait standar akuntansi keuangan yang seharusnya dijadikan sebagai pijakan untuk membuat laporan keuangan.

Sholikhah dkk (2017) menyatakan bahwa pencatatan laporan keuangan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh UMKM. Karena laporan keuangan merupakan pokok atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan dan juga dapat menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan mencapai tujuannya.

Oleh karena itu harus ada perhatian lebih dari pihak pemerintah yaitu berupa sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan pelaku UMKM terhadap kesadaran akan pentingnya pencatatan laporan keuangan yang sesuai standar. Kondisi saat ini, UMKM hanya memikirkan bagaimana mendapatkan pesanan yang banyak dari pelanggan. Kondisi seperti itu harus diimbangi dengan pemahaman mengenai akuntansi, dan pemilik UMKM harus tahu manfaat diterapkannya sistem akuntansi pada usaha mereka.

Dalam hal ini Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan sebuah standar baru dalam penyusunan laporan keuangan untuk UMKM yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang resmi diberlakukan efektif 1 Januari 2018. Standar yang baru ini dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah (SAK EMKM, 2016). Diharapkan entitas mikro, kecil dan menengah bisa menerima dan siap untuk menggunakan peraturan yang baru ini.

Pada tanggal 25 April 2017 di Kabupaten Blora telah dimulai sebuah pelatihan *Score Plus* oleh Pemkab Blora melalui Dekranasda, PKK dan Dindagkop UKM. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, daya saing dan cakupan pemasaran UMKM di Kabupaten Blora. Pelatihan yang kurang lebih selama 3 bulan ini diikuti oleh 20

UMKM terpilih dari 100 UMKM di Kabupaten Blora. Pelatihan ini berorientasikan pada 5 aspek yaitu aspek efisiensi kerja, aspek keselamatan kerja, aspek pembukuan usaha, aspek menghitung harga pokok dan aspek ide pengembangan produk (Jatengprov.go.id).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pelaku UMKM dalam mengimplemantasikan SAK EMKM. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan pelaku UMKM nantinya bisa menerapkan aturan dengan sebenarnya. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga mempermudah pelaku UMKM untuk meningkatkan akses modal dari perbankan apabila diperlukan.

### **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM)**

Pada tanggal 18 mei 2016 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah melakukan rapat dan menghasilkan serta menyetujui *Eksposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (ED SAK EMKM) dan pada 24 Oktober 2016 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) yang dinyatakan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018 tetapi penerapan dini telah dianjurkan. Standar ini disusun guna untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil dan menengah.

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana daripada SAK ETAP, karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM, yaitu dengan dasar pengukuran menggunakan biaya historis, sehingga cukup mencatat asset dan liabilitas sebesar biaya perolehan (SAK EMKM, 2016 ). Di dalam SAK EMKM ini tidak dijelaskan terkait definisi dan kriteria kuantitatif EMKM. Maka digunakanlah *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008* tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk acuan dalam mendefinisikan.

Penerbitan SAK EMKM ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan untuk UMKM yang bergerak di berbagai jenis usaha. Di dalam SAK EMKM juga dican-tumkan mengenai Dasar Kesimpulan (DK) dan Contoh Ilustratif sehingga mempermudah UMKM dalam memahami standar akuntansi. Oleh karena itu, penerbitan SAK EMKM ini dapat membantu UMKM dalam akses pendanaan dari lembaga keuangan.

### **Akrual Basis**

Basis akrual (*accrual basis*) adalah teknik pencatatan yang mengakui terjadinya transaksi walaupun penerimaan kas dan pengeluaran kas belum terjadi atau kas baru diterima dan dikeluarkan di masa depan. Laporan keuangan dengan basis akrual mengakui adanya utang dan piutang. Dengan diakuinya pendapatan dan beban pada laporan keuangan dengan basis akrual sehingga informasi akan lebih relevan dengan setiap transaksi yang terjadi (Rahayu,

2015).

Berdasarkan SAK EMKM (2016) laporan keuangan EMKM disusun berdasarkan asumsi dasar akrual. DSAK IAI memutuskan untuk mempertahankan asumsi dasar akrual karena asumsi dasar tersebut konsisten dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan, dan konsisten dengan asumsi dasar yang digunakan dalam SAK lainnya. Laporan keuangan yang disusun dengan dasar akrual akan menghasilkan informasi keuangan yang lebih merepresentasikan dengan tepat kondisi dan aktivitas bisnis entitas pada periode tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, tingkat kesiapan UMKM dalam implementasi SAK EMKM bisa dinilai dari sistem pencatatan keuangannya. Apabila UMKM dalam pencatatan keuangan berdasarkan akrual basis, maka UMKM dinilai siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Sehingga UMKM akan lebih mudah dalam menerapkan SAK EMKM. Namun apabila UMKM dalam pencatatan keuangan menggunakan kas basis, UMKM dinilai tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Dikarenakan laporan keuangan yang berbasis kas harus melakukan penyesuaian terlebih dahulu kas ke basis akrual.

### **Konsep Entitas Bisnis**

Menurut Jusup (2011), konsep entitas bisnis adalah ketika entitas tersebut berdiri tersendiri sebagai suatu kesatuan yang terpisah. Konsep entitas bisnis ini adalah untuk mempermudah mengetahui apakah entitas mengalami perkembangan atau bahkan sebaliknya.

SAK EMKM mendeskripsikan konsep entitas bisnis sebagai salah satu asumsi dasar. Untuk dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas harus dapat memisahkan kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan dan hasil usaha entitas tersebut. DSAK IAI menegaskan bahwa dalam hal entitas tidak memenuhi asumsi dasar konsep entitas bisnis maka entitas tersebut memiliki opsi untuk tidak menerapkan SAK EMKM (SAK EMKM, 2016).

Berdasarkan pernyataan di atas, tingkat kesiapan UMKM dalam implementasi SAK EMKM akan dinilai dari konsep entitas bisnis. Jika UMKM belum memisahkan harta pribadi dengan usahanya, entitas tersebut tidak memenuhi konsep entitas bisnis. Sehingga entitas tersebut akan dinilai tidak siap dalam menerapkan SAK EMKM. UMKM yang sudah memisahkan harta pribadi dengan usaha berarti sudah memenuhi konsep entitas bisnis sehingga dinilai siap dalam menerapkan SAK EMKM.

### **Sumber Daya Manusia**

Menurut Hariandja (2002) Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan disamping faktor yang lain seperti modal. Oleh

karena itu SDM harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Sedangkan menurut Hasibuan (2003) Pengertian Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Sumber daya manusia dalam penelitian ini dimaksudkan adalah SDM yang memiliki pengetahuan tentang standar akuntansi keuangan di Indonesia. Sehingga SDM yang dimaksud adalah yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Sebagaimana dalam SAK EMKM bahwa penyusunan laporan keuangan minimal mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Maka penilaian dalam kesiapan UMKM dalam implementasi SAK EMKM bisa dilihat dari SDM yang memadai. Apabila UMKM mempunyai SDM yang memadai maka dinilai siap dalam implementasi SAK EMKM. Sebaliknya apabila UMKM tidak memiliki SDM yang memadai maka dinilai tidak siap dalam implementasi SAK EMKM.

### **Laporan Keuangan EMKM**

Menurut Jusup (2011) Laporan keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan utama perusahaan terdiri dari neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Sedangkan dalam SAK EMKM (2016) dijelaskan bahwa laporan keuangan suatu entitas minimum terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba-rugi, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam SAK EMKM dijelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor (SAK EMKM, 2016)

SAK EMKM 2016 menjelaskan jenis laporan keuangan dan ruang lingkupnya sebagai berikut :

#### **1. Laporan Posisi Keuangan**

Menurut Jusup (2011) Laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan asset (harta kekayaan), kewajiban, dan modal (ekuitas) yang dimiliki oleh suatu entitas pada suatu saat tertentu. Ruang lingkup laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang asset, liabilitas dan ekuitas pada akhir periode pelaporan. Dalam SAK EMKM

laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut, kas dan setara kas, piutang, persediaan, asset tetap, utang usaha, utang bank, dan ekuitas (SAK EMKM, 2016).

## 2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi disusun dengan maksud untuk menggambarkan hasil operasi sebuah entitas dalam suatu periode tertentu. Hasil operasi entitas diukur dengan membandingkan antara penghasilan entitas dengan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut (Jusup, 2011).

Penghasilan adalah aliran penerimaan kas atau asset lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian jasa, penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) dan keuntungan (*gains*) (Jusup, 2011). Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal. Beban adalah aset yang digunakan atau dikeluarkan dalam proses untuk memperoleh pendapatan. Beban mencakup beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang normal (*expenses*) dan kerugian (*losses*) (Jusup, 2011). Berdasarkan SAK EMKM (2016) laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut, pendapatan, beban keuangan, dan beban pajak. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode.

## 3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan entitas. Catatan laporan keuangan juga disajikan secara sistematis supaya lebih memudahkan pemahaman bagi pengguna laporan keuangan. Berdasarkan SAK EMKM (2016) catatan atas laporan keuangan memuat :

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi
- c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

## **Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan *Undang-undang No. 20 Tahun 2008* usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Kriteria usaha mikro menurut *Undang-undang No. 20 Tahun 2008* adalah sebagai

berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dijelaskan dalam *Undang-undang No. 20 Tahun 2008* usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.

Sesuai *Undang-undang No. 20 Tahun 2008* kriteria usaha kecil adalah :

1. Memiliki kekayaan bersih dari 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan *Undang – undang No. 20 Tahun 2008* adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar.

Sedangkan kriteria usaha menengah menurut *Undang – undang No. 20 Tahun 2008* berdasarkan kekayaan adalah apabila :

1. Perusahaan memiliki kekayaan bersih lebih dari 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2017 sampai selesai. Dalam penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Blora yaitu pada UMKM yang telah mengikuti pelati-

han *score plus* dari Pemerintah Kabupaten Blora.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini dilakukan dengan survey untuk mengetahui perihal penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh UMKM. Peneliti juga akan melakukan wawancara terkait SAK EMKM serta dokumentasi catatan keuangan entitas dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan entitas dalam implementasi SAK EMKM. Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah UMKM di Kabupaten Blora yaitu sebanyak 5.954.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2014). Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM atau karyawan bagian akuntansi. Pemilihan sampel dalam penelitian ini berdasarkan. Kriteria dalam *Undang-Undang No. 20 Tahun 2008* tentang UMKM.

1. Sampel yang dipilih adalah 2 dari 20 UMKM peserta pelatihan *score plus* di Kabupaten Blora.
2. Dua UMKM yang dipilih adalah :
  - a. Rumah Mode Een Productions adalah UMKM terbesar dari 20 peserta pelatihan *score plus*. (Hasil survey dan wawancara beberapa peserta lainnya : Kanaya Konveksi, Omah Shofie, dan Grafika Productions).
  - b. Kanaya Konveksi adalah UMKM dengan perkembangan yang cukup sehat dibandingkan 20 peserta lainnya. Karena baru 2 tahun berdiri, omset penjualan perusahaan rata-rata mencapai 30.000.000,00 per bulan. (Hasil wawancara dengan pemilik Kanaya Konveksi).

Instrumen penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dokumen berupa catatan keuangan perusahaan dan wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada informan penelitian. Kesiapan UMKM dinilai siap dan tidak siap sesuai dengan indikator dibawah ini :

Tabel. 1.

## Indikator Kesiapan UMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM

No	Indikator	Keterangan
1	Penerbitan SAK EMKM	Apabila pelaku UMKM mengetahui penerbitan SAK EMKM maka dinilai siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Sebaliknya apabila pelaku UMKM tidak mengetahui adanya penerbitan SAK EMKM maka, dinilai tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM
2	Sistem Pencatatan	Di dalam SAK EMKM dalam menyusun laporan Keuangan Basis AkruaI keuangan mensyaratkan menggunakan basis akruaI. Apabila UMKM sudah menerapkan basis akruaI pada pencatatan keuangan perusahaan maka, dinilai siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM. Sebaliknya jika UMKM tidak menerapkan basis akruaI pada pencatatan keuangan perusahaan, maka dinilai tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM.
3	Konsep Entitas Bisnis	Di dalam SAK EMKM mensyaratkan UMKM untuk menerapkan konsep entitas bisnis. Maka apabila UMKM sudah menerapkan konsep entitas bisnis maka dinilai siap untuk mengimplementasikan SAK EMKM. Sebaliknya apabila UMKM belum menerapkan konsep entitas bisnis maka dinilai tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM.
4	Ketersediaan SDM yang Memadai	Ketersediaan SDM disini adalah adanya SDM yang dimiliki UMKM dan paham dengan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan dalam SAK EMKM yaitu terdiri dari : (1) Laporan Posisi Keuangan, (2) Laporan Laba & Rugi, dan (3) Laporan Posisi Keuangan. Apabila UMKM memiliki SDM yang memadai maka dinilai siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Sebaliknya apabila UMKM tidak memiliki SDM yang memadai maka dinilai tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM.

Uji keabsahan data, menurut (Sugiyono, 2014), meliputi uji *credibility* (validitas internal), uji *transferability* (validitas eksternal), uji *dependability* (reliabilitas), dan uji *confirmability* (obyektivitas). Penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dalam menguji keabsahan data. Uji kredibilitas data akan dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi ada tiga macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber dalam menguji keabsahan data.

Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain; membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen. Triangulasi sumber akan dilakukan selama penelitian, yaitu pada hasil wawancara, hasil pengamatan, dan hasil temuan berupa dokumen perusahaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis data dilakukan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Hasil penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dengan temuan berupa dokumen catatan keuangan perusahaan.

Pertama, berdasarkan hasil temuan wawancara dengan Ibu Een Martini dan dokumen pencatatan transaksi harian dari Rumah Mode Een Productions . Karena tidak melakukan penyusunan laporan keuangan maka peneliti menggunakan pencatatan transaksi harian Rumah Mode Een Productions. Menunjukkan bahwa Usaha Rumah Mode Een Productions tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM, hal tersebut dikarenakan :

1. Rumah Mode Een Productions tidak mengetahui tentang SAK EMKM. Karena belum mendapatkan sosialisasi dari Dindagkop UKM Kabupaten Blora.
2. Dalam pencatatan keuangan masih menggunakan basis kas. Karena Rumah Mode Een Productions mencatat transaksi ketika mengeluarkan dan menerima kas.
3. Rumah Mode Een productions sudah menerapkan konsep entitas bisnis. Walaupun sudah memisahkan keuangan pribadi dan usaha, tetapi dalam penentuan keuntungannya masih belum jelas
4. Rumah Mode Een Productions belum membuat laporan keuangan. Dikarenakan tidak adanya SDM yang paham tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Kedua, berdasarkan temuan hasil wawancara dengan Ibu Yuniati dan dokumen pencatatan transaksi Kanaya Konveksi menunjukkan bahwa Kanaya Konveksi tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Dikarenakan :

1. Kanaya Konveksi tidak mengetahui tentang adanya standard akuntansi keuangan yang baru yaitu SAK EMKM.
2. Dalam pencatatan keuangan masih menggunakan basis kas.

4. Walaupun sudah memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha, serta paham tentang pentingnya laporan keuangan tetapi, Kanaya Konveksi belum memiliki SDM yang memahami tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standard akuntansi keuangan.

Penelitian ini mendapatkan temuan di luar konteks yang diteliti yaitu bahwa jenjang pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesiapan implementasi SAK EMKM. Walaupun jenjang pendidikan tinggi tetapi tanpa ada sosialisasi, pelatihan dan pendampingan maka SDM tidak akan memahami tentang penyusunan laporan keuangan. Seperti halnya Ibu Eni Martini dengan pendidikan S1 dan Ibu Yuniati dengan pendidikan SMP tetapi mereka memiliki pemahaman yang sama dalam pembukuan usaha.

Awalnya mereka tidak mengetahui tentang pembukuan usaha dan tidak menerapkan konsep entitas bisnis. Tetapi setelah mereka mengikuti pelatihan, dampak positif yang didapat adalah mereka sama – sama mengetahui cara melakukan pembukuan usaha walaupun masih sederhana dan mereka tahu bahwa dalam menjalankan usaha yang benar adalah harus ada pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi.

Tabel. 2.

## Kesiapan UMKM Dalam Implementasi SAK EMKM

No	Nama UMKM	Faktor Kesiapan dalam Implementasi SAK EMKM			
		Penerbitan SAK EMKM	Sistem Pencatatan	Konsep Entitas Bisnis	SDM yang Memadai
1	Rumah Mode Een Productions	Tidak Mengetahui	Basis Kas	Sudah Menerapkan	Tidak Ada
2	Kanaya Konveksi	Tidak Mengetahui	Basis Kas	Sudah Menerapkan	Tidak Ada

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keselarasan dengan penelitian terdahulu, sebagai berikut :

1. Penelitian Hendra Aditya, Agung Praptapa, dan Cristina Tri Setyorini (2015) dengan judul

*“the challenges of implementation accounting standards for entitas without public accountability on small and medium enterprises”* penelitian dilakukan di Kabupaten Kebumen dengan 5 informan, metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut adalah 5 UMKM di Kabupaten Kebumen tidak menerapkan SAK ETAP.

2. Penelitian Aamir dan Farooq (2010) *“assessing the preparedness of small and medium sized entitas in Swedia to adopt international financial standard (IFRS) for small and medium*

*sized entitas (SMEs)*” penelitian di Swedia dengan 11 informan , metode kualitatif. Dengan hasil UMKM di Swedia tidak siap menerapkan IFRS for SMEs.

3. Penelitian Rudiantoro dan Siregar (2012) “kualitas laporan keuangan UMKM serta prospek implementasi SAK ETAP” penelitian dilakukan di Jabotabek dan Jawa dengan 50 sampel, metode yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil penelitian 50 UMKM belum menerapkan SAK ETAP.
4. Penelitian Teti Rahmawati, dan Oktaviani Rita Puspasari (2017) “implementasi SAK ETAP dan kualitas laporan keuangan UMKM” penelitian dilakukan di Kabupaten Kuningan dengan sampel 206, metode kuantitatif. Hasilnya UMKM di Kabupaten Kuningan tidak siap menerapkan SAK ETAP.
5. Penelitian I Made Narsa, Agus Widodo dan Kurnianto (2012) “kesiapan UMKM dalam implementasi SAK ETAP” menggunakan metode kualitatif dengan hasil UMKM tidak siap menerapkan SAK ETAP.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian kesiapan UMKM terhadap implementasi SAK EMKM, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Rumah Mode Een Productions dan Kanaya Konveksi dinilai tidak siap dalam mengimplementasikan SAK EMKM. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian. Kedua UMKM tersebut tidak mengetahui adanya SAK baru bagi UMKM yaitu SAK EMKM. Pencatatan keuangan kedua usaha tersebut masih menggunakan basis kas. Walaupun sudah melakukan pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Namun kedua usaha tersebut belum memiliki sumber daya manusia yang memahami tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standard akuntansi keuangan.
2. Beberapa faktor yang menjadi kendala kesiapan UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM adalah :
  - a. Kesadaran akan pentingnya laporan keuangan, belum dimiliki oleh UMKM.
  - b. Tidak adanya sosialisasi, pelatihan dan pendampingan dari pemerintah kepada UMKM tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil.
  - c. Pengetahuan tentang SAK EMKM yang dimiliki oleh UMKM masih minim.

## Saran

Berikut saran yang terkait dengan hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya :
  - a. Subyek penelitian bisa di daerah lain atau perkotaan untuk memperluas UMKM yang diteliti.
  - b. Memperbanyak subyek penelitian sehingga hasil penelitian bisa digunakan untuk generalisasi UMKM lainnya.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan membuat program untuk pengembangan UMKM dibidang pembukuan usaha yang lebih baik. Yaitu berupa pembuatan aplikasi untuk laporan keuangan atau sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan terkait SAK EMKM. Sehingga UMKM mendapatkan pengetahuan baru tentang penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standard akuntansi keuangan.
3. Bagi UMKM, hendaknya mencari informasi tentang terbitnya standard akuntansi keuangan bagi UMKM yaitu SAK EMKM. Menyiapkan SDM yang mempunyai pengetahuan dibidang akuntansi untuk mulai menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standard akuntansi keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aamir, S., dan Farooq, U. (2010). *Assessing the preparedness of small and medium-sized entities in sweden to adopt international financial reporting standard (IFRS) for small and medium-sized entities (SMEs)*, Thesis, Master in Accounting from the Umea School of Business at Umea University, Umea.
- Aditya, H., Praptapa, A., dan Setyorini, C. T. (2015). *The challenges of implementation accounting standards for entities without public accountability on small and medium enterprises*. Simposium Nasional Akuntansi XVIII, Medan. Diselenggarakan tanggal 16-19 September 2015.
- Afriyadi, A. D. (2017). *UMKM sangat perlu dukungan akses pembiayaan*. 16 Desember 2017. [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com).
- Arifah, A. N. (2017). *Analisis kesiapan lima usaha kecil dalam implementasi SAK EMKM di Kabupaten Purworejo*, Thesis, Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Cahyati, A. D., Mulyanti, K., dan Setyawasih R. (2011). *Pemahaman dan kesiapan UKM*

- dalam implementasi SAK ETAP : Survey Pada UKM di Bekasi. *Dosen Ekonomi UNISMA Bekasi . Vol. 2, No. 2, 19-27.*
- Chandra, A. A. (2016). *Sumbangan PDB hingga 60,34% kadin ingin UMKM jadi unggulan ekonomi RI.* 24 Desember 2017. [m.detik.com](http://m.detik.com).
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2016). *Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah.* Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Divianto, dan Febriyanty. (2017). Pengaruh pemahaman pelaku UKM dalam menyusun laporan keuangan terhadap implementasi laporan keuangan berdasar SAK ETAP dengan persepsi pelaku UKM sebagai moderating variable. *International Jurnal of Social Science and Bussines. Vol.1, No. 1, 166-176.*
- Genjot pertumbuhan ekonomi, Pemkab Blora fasilitasi pengembangan UKM. (2017, 26 Desember). [www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id).
- Hariandja, dan MARIHOT T.E. (2002). *Manajemen sumber daya manusia.* Jakarta : Grasindo.
- Hasibuan, dan Malayu S.P. (Eds). (2003). *Manajemen sumber daya manusia.* Jakarta : Bumi Aksara.
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. (1999). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen.* Yogyakarta : Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Info syarat pengajuan KUR BRI. (2017, 15 Desember). [ib.bri.co.id](http://ib.bri.co.id).
- Jusup, A. H. (2011). *Dasar-dasar akuntansi (Ed. ke-7).* Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Narsa, I. M., Widodo A., dan Kurnianto S. (2012). Mengungkap kesiapan UMKM dalam implementasi standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas public (PSAK-ETAP) untuk meningkatkan akses modal perbankan. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.* No. 3.
- Presiden Republik Indonesia (2008). *Undang – undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.* Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Presiden Republik Indonesia.
- Rahayu, Y. (2015). Basis menuju sistem akuntansi accrual basis. *Jurnal Ecodemica. Vol. 3, No. 1, 348-354.*
- Rahmawati, T., dan Puspasari O. R. (2017). Implementasi SAK ETAP dan kualitas laporan keuangan UMKM terkait akses modal perbankan. *Jurnal Kajian Akuntansi. Vol. 1, No. 1, 49-62.*

- Rudiantoro, R., dan Siregar, S. V. (2012). Kualitas laporan keuangan UMKM serta prospek implementasi SAK ETAP. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9, No. 1, 1-21.
- Setiady, M. (2016). Telaah kesiapan dan prospek implementasi SAK ETAP ; Studi kasus pada pengusaha UMKM garmen di pusat grosir Surabaya.
- Solikah, M., Astuti, P., dan Paramitha, D. A. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wirausahawan terhadap pentingnya pembukuan dan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*. Vol. 2, No. 1, 12-21.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian manajemen*. Bandung : Alfabeta.